

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada Bab II dan pembahasan pada Bab III terhadap Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Pratama Tangerang Timur, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Barang Milik Negara yang dihapuskan pada KPP Pratama Tangerang Timur adalah kendaraan dinas operasional yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis untuk diperbaiki.

Penghapusan dilakukan untuk lebih efisiensi dan efektivitas dalam kinerja satuan kerja sehingga tidak lagi menggunakan Barang Milik Negara yang sudah tidak efektif untuk dipakai serta jika dipakai akhirnya menambah biaya pemeliharaan. Penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan melalui penjualan dengan cara dilelang karena disimpulkan lebih menguntungkan karena menambah penerimaan bagi Negara.

Proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Surat Edaran Menteri keuangan Nomor 36/MK.1/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ditinjau dari dasar hukum yang berlaku, secara keseluruhan proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Pratama Tangerang Timur yang dimulai dari pembentukan tim internal, penghapusan, sampai pembuatan laporan penghapusan Barang Milik Negara telah sesuai, namun masih terdapat beberapa kendala.

Kendala yang terjadi bukan karena faktor internal dari KPP Pratama Tangerang Timur sendiri melainkan adanya pandemi *Covid-19* yang membuat segala pekerjaan yang bisa dilakukan *offline* dialihkan menjadi *online*. Akibat faktor itu proses lelang yang tadinya bisa dihadiri oleh pembeli kini hanya dilakukan melalui *website* sehingga kurang mendapatkan momentum proses lelang.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan, berikut beberapa saran membangun yang ditujukan agar pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara lebih baik. Pertama, proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Pratama Tangerang Timur sudah baik agar bisa terus dipertahankan dan bisa ditingkatkan dengan cara penatausahaan dokumen yang bisa dibuat ke digital.

Kedua, cara mempromosikan barang yang akan dihapuskan melalui lelang bisa dibuat *website* atau aplikasi sendiri sesuai KPP Pratama masing-masing agar lebih efektif. Ketiga, membuat *database* yang terintegrasi antara Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang, agar lebih efisien dalam proses penghapusan Barang Milik Negara kedepannya.